UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP ASET DEBITOR YANG DISITA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KEMAL MARUSZAMA, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus,* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Asra, 2015, *Kepailitan Korporasi*, Diadit Media, Jakarta.

Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan,* Alumni, Bandung.

Bryan A. Garner, et.al., 2004, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, USA.

Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fred B.G. Tumbuan, 2005, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Ismail Rumadan dkk., 2003, *Laporan Penelitian Interpretasi Tentang Makna "Utang Jatuh Tempo" Dalam Perkara Kepailitan*, Mahkamah Agung, Jakarta.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kartini Muljadi, 2001, *Actio Paulina dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pusat Pendidikan dan Pelatihan, 1992, *Pokok-pokok Rumusah Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Ledeng Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP ASET DEBITOR YANG DISITA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KEMAL MARUSZAMA, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mahadi, 2003, *Filsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dan Perspektif Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta.

Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

_____, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta,

Mariam Darus Badrulzaman, et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Man S. Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Notonegoro, 1961, *Pancasila Falsafah Negara*, Airlangga, Surabaya

Noto Hamidjoyo, *2006, Demi Kemanusiaan dan Keadilan* dalam Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Parwoto Wignjosumarto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (himpunan makalah)*, Tatanusa, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah, Malang.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Retnowulan Sutantio, 1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Varia Yustisia, Bandung.

Rivai Wirasasmita, et.al, 2002, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Pionir Jaya, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Akumni, Bandung.

Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta.

Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP ASET DEBITOR YANG DISITA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KEMAL MARUSZAMA, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Siti Anisah, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Total Media, Yogayakarta.

Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordingdening juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

_____, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Sumadji P, et.al, 2006, *Kamus Ekonomi Edisi Lengkap*, Wilpress, Makassar.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2015, Penelitian *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Yesril Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

Zainal Asikin, 2003, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

H.I.R (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 *tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2000 *tentang Permohonan Pailit Demi Kepentingan Umum*.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 *tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 *tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP ASET DEBITOR YANG DISITA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KEMAL MARUSZAMA, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A/JA/12/2010 *tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN)*.

C. Makalah, Artikel, Jurnal

Agussalim Nasution, 2008, *Standar Kepentingan Umum Dalam Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Menurut Hukum Kepailitan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Ari Purwadi, *Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank yang Bermasalah*, Perspektif Vol. 16. No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.

Bekti Wicaksono, 2014, *Kajian Yuridis Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Fred BG. Tumbuan, 2005, *Komentar Atas Catatan Terhadap Putusan No: 14 K/N/2004 Jo. No. 18/Pailit/Pniaga/Jkt.Pst*, dalam Valerie Selvie Sinaga, *Analisa Putusan Kepailitan Pada Pengadilan Negeri Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta.

Hilda Ainy Apriliany, 2019, *Permohonan Kepailitan demi Kepentingan Uum dalam Perspektif Asas Kepentingan Umum*, Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 10 Nomor 02 Desember 2019.

Imam Akbar Dinata, 2020, *Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Berdasarkan Kepentingan Umum*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Riska Wijayanti dan Siti Malikhatun Bariyah, Tanpa Tahun, *Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Kepailitan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin*, Jurnal Universitas Diponegoro, Semarang.

Marwan Effendy, 2009, *Peran, Visi, Misi dan Strategi Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia "evaluasi pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 Tahun 2004 dengan penekanan pada pengadaan barang/jasa pemerintah dan pakta integritas",* Makalah Rapat Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Pekanbaru Riau, Rabu 29 April 2009.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Pengertian Utang dalam Kepailitan*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, Januari.

D. Wawancara

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP ASET DEBITOR YANG DISITA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KEMAL MARUSZAMA, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wawancara dengan Narendra Jatna Asisten Khusus Jaksa Agung pada tanggal 20 Oktober 2020.

Wawancara dengan Erick Muskita Advokat, Kurator & Pengurus pada tanggal 22 Oktober 2020.

Wawancara dengan Feby Gumilang Gunawan Kasiepidsus Kota Cimahi pada tanggal 26 Oktober 2020.

Wawancara dengan Mira Sylvania Advokat, Kurator & Pengurus pada tanggal 27 Oktober 2020.

E. Internet

Devina Halim, *Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan Kembalikan Aset Korban*, https://nasional.kompas.com/read/2019/11/18/20593861/kasus-first-travel-kejaksaan-agung-janji-buat-terobosan-untuk-kembalikan, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Puan Adria Ikhsan, *Contoh Kasus: Pemohon Pailit Demi Kepentingan Umum*, http://iniprolog.blogspot.com/2017/06/contoh-kasus-pemohon-pailit-demi.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

Nanda Narendra Putra*, First Travel Masuk PKPU Tetap, 'Pihak Ketiga' Akan Berangkatkan 60 Ribu Jamaah*, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59d61e79dc3a2/first-travel-masuk-pkpu-tetap--pihak-ketiga-akan-berangkatkan-60-ribu-jamaah/, diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada tanggal 28 September 2020.